

Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Sistem Manajemen Pendidikan terhadap Mutu Sekolah Dasar di Kota Malang

The Effect of Fiscal Decentralization and Education Management Systems on the Quality of Elementary Schools in Malang City

doi: 10.24832/jpnk.v9i1.4929

Teguh Triwiyanto, Desi Eri Kusumaningrum

Universitas Negeri Malang - Indonesia

Email: teguh.triwiyanto.fip@um.ac.id

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan

Vol. 9, Nomor 1, Juni 2024

ISSN-p: 2460-8300

ISSN-e: 2528-4339

Naskah diterima: 26-02-2024

Naskah disetujui: 06-06-2024

Terbit: 30 Juni 2024

Abstract: *The research aims to determine the influence of fiscal decentralization and educational management systems on the quality of primary schools. The study employed a quantitative approach with hypotheses. The population consisted of 195 public primary schools in Malang City, East Java. Sampling was conducted using stratified random sampling and probability sampling techniques, where the total population was divided into homogeneous groups based on districts. The research sample included 22 public primary schools. The results indicate that fiscal decentralization has a non-significant effect on school quality, whereas there is a significant positive impact of the educational management system on the quality of primary schools. Thus, fiscal decentralization and educational management are determining factors in educational outcomes, and their combined effects synergistically enhance school quality.*

Keywords: *fiscal decentralization, education management system, elementary school quality*

Abstrak: *Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal dan sistem manajemen pendidikan terhadap mutu sekolah dasar. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan hipotesis. Populasi penelitian berjumlah 195 sekolah dasar negeri di Kota Malang, Jawa Timur. Pengambilan sampel dilakukan secara acak berstrata dan teknik pengambilan sampel probabilitas dengan total populasi dibagi menjadi kelompok berdasarkan kecamatan yang homogen. Sampel penelitian yang digunakan sejumlah 22 sekolah dasar negeri. Hasil penelitian menunjukkan desentralisasi fiskal berpengaruh tidak signifikan terhadap mutu sekolah tetapi terdapat pengaruh signifikan positif sistem manajemen pendidikan terhadap mutu sekolah dasar. Dengan demikian, desentralisasi fiskal dan manajemen pendidikan adalah faktor yang menentukan hasil pendidikan dan gabungan dampak keduanya bersifat sinergis dalam meningkatkan mutu sekolah.*

Kata kunci: *desentralisasi fiskal, sistem manajemen pendidikan, mutu sekolah dasar*

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal adalah sebuah konsep dinamis dalam keuangan publik yang berkaitan dengan alokasi kekuasaan perpajakan dan belanja di antara berbagai tingkat pemerintahan dalam suatu sistem politik (Hanif, Wallace, & Gago-de-Santos, 2020; Shahid Shahid, Ahmad, Naushahi, & Inaya, 2024). Desentralisasi fiskal bertujuan untuk mendistribusikan tanggung jawab keuangan dan wewenang pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, seperti kota, daerah, atau negara bagian (Ergenc & Yuksekkaya, 2024; Smith, 2023). Desentralisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian layanan publik, meningkatkan akuntabilitas daerah, dan mendorong pembangunan ekonomi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi unik masyarakat lokal (Dick-Sagoe, 2020; Krawchenko, 2021).

Sebuah studi inovatif menemukan korelasi yang signifikan antara desentralisasi fiskal, sistem manajemen pendidikan yang efektif, dan peningkatan kualitas sekolah dasar (Muttaqin, van Duijn, Heyse, & Wittek., 2016; Nasrullah, Amin, & Soomro, 2021). Desentralisasi fiskal merupakan sebuah kerangka konseptual di mana kewenangan pengambilan keputusan dan sumber daya keuangan dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dapat menjadi strategi utama untuk meningkatkan mutu pendidikan (Lubuulwa, 2021; Nyikadzino & Vyas, 2022). Lebih lanjut penelitian tersebut menjelaskan ketika pemerintah daerah diberi otonomi yang lebih besar atas anggaran pendidikan dan pengambilan kebijakan, mereka akan lebih mampu menyesuaikan sistem pengelolaan pendidikannya untuk memenuhi kebutuhan unik masyarakatnya. Dengan demikian dapat meningkatkan kualitas sekolah dasar yang diukur dari prestasi siswa, semangat kerja guru, dan kepuasan orang tua.

Sistem manajemen pendidikan merupakan jaringan kebijakan, struktur, proses, dan

pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas administrasi, tata kelola lembaga, dan sistem pendidikan. Sistem ini mencakup spektrum kegiatan yang luas, termasuk pengembangan kurikulum, perekrutan dan pelatihan guru, penilaian siswa, alokasi sumber daya, dan tata kelola sekolah (Glover & Levaèiæ, 2020; Rosser & Fahmi, 2016). Pengelolaan pendidikan yang efisien dan efektif sangat penting untuk memastikan akses yang adil terhadap pendidikan bermutu, meningkatnya hasil pembelajaran siswa, dan mendorong pembangunan masyarakat. Dinamika sistem manajemen pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kondisi sosial ekonomi, norma budaya, kemajuan teknologi hingga ideologi politik dan filsafat pendidikan.

Dalam manajemen pendidikan, berbagai pendekatan dan model telah muncul dari waktu ke waktu yang mencerminkan beragam perspektif mengenai kepemimpinan organisasi, proses pengambilan keputusan, dan mekanisme akuntabilitas (Bush, 2020; Shaked, 2019). Dari birokrasi yang tersentralisasi hingga menjadi sistem desentralisasi dengan otonomi yang lebih besar bagi sekolah, pengelolaan pendidikan telah mengalami evolusi berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang muncul dan memanfaatkan peluang untuk perbaikan pendidikan. Selain itu, munculnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah manajemen pendidikan, memungkinkan praktik inovatif dalam pengambilan keputusan berbasis data, lingkungan pembelajaran virtual, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Di Indonesia, desentralisasi pendidikan dasar dilaksanakan di tingkat kabupaten dan kota, sedangkan pendidikan menengah didesentralisasikan di tingkat provinsi (Efriandi, Couwenberg, & Holzhacker, 2019; Purwanto & Pramusinto, 2018). Pendekatan desentralisasi ini mencerminkan perubahan paradigma dalam cara merancang, mengembangkan, dan

berinteraksi dengan sistem, sekaligus menandai perubahan signifikan dari model masa lalu yang tradisional, *top-down*, dan terpusat. Dengan mendistribusikan kekuasaan dan kendali di seluruh jaringan simpul otonom, sistem desentralisasi memungkinkan bentuk organisasi yang lebih demokratis, transparan, dan tangguh (George, Sagayarajan, AlMatroudi, & George, 2023; Zargham & Nabben, 2022). Dalam kerangka ini, otoritas pengambilan keputusan didesentralisasi sehingga memungkinkan terjadinya adaptasi dan respons secara bersamaan (*real-time*) terhadap perubahan keadaan.

Dalam desentralisasi, penghapusan satu titik kegagalan memastikan bahwa sistem tetap berfungsi meskipun terjadi kegagalan pada individu tertentu. Arsitektur terdesentralisasi ini memiliki implikasi luas bagi berbagai industri, termasuk keuangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan tata kelola, yang memungkinkan penyimpanan dan transmisi data aman, efisien, dan anti gangguan (Anthony, 2023; Jennifer Jennifer, Isravel Sagayam, Bhushan, Sei, & Eunice, 2023). Akibatnya, para inovator semakin beralih ke sistem desentralisasi untuk membangun solusi yang lebih kuat, mudah beradaptasi, dan adil sehingga menjadikan bidang ini layak untuk dieksplorasi dan diteliti lebih lanjut.

Pendekatan desentralisasi mencerminkan perubahan paradigma dalam berbagai fokus pembangunan. Model tata kelola konvensional yang bersifat *top-down* digantikan oleh kerangka kerja yang lebih demokratis, terdistribusi, dan partisipatif. Dengan memberdayakan masing-masing pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam proses, pendekatan desentralisasi ini menumbuhkan budaya kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas (Lee, 2024; Omapas, Parinasan, Ben, Peñero, & Quiñanola, 2024). Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengakses data

dan sumber daya yang lebih luas, sehingga mempercepat penemuan pengetahuan dan inovasi baru. Selain itu, pendekatan desentralisasi ini memungkinkan adanya fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan daya tanggap yang lebih besar terhadap tren dan tantangan yang akan menghasilkan sistem manajemen yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan (Gilrein, Carvalhaes, Markolf, Chester, Allenby, & Garcia, 2021; Gilrein, Carvalhaes, Markolf, Chester, Allenby, & Garcia, 2021; Groenewald, Groenewald, Uy, Kilag, Abendan, & Dulog., 2024). Dengan mendistribusikan kekuasaan dan wewenang pengambilan keputusan, pendekatan ini juga mendorong ekosistem pembangunan yang lebih adil dan beragam, di mana beragam suara dan perspektif dihargai dan diperkuat.

Penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal dan sistem manajemen pendidikan terhadap kualitas sekolah dasar negeri di Kota Malang, Jawa Timur sangat diperlukan karena faktor-faktor tersebut berperan penting dalam menentukan hasil pendidikan. Desentralisasi fiskal dapat memberdayakan pemerintah daerah dengan otonomi untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, yang secara langsung berdampak pada infrastruktur, kualitas guru, dan materi pendidikan yang tersedia di sekolah. Selain itu, terdapat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (Nurlaili, 2022). Desentralisasi Kota Malang berada pada kriteria sedang dan tingkat ketergantungan Kota Malang terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi, realisasi penerimaan PAD Kota Malang termasuk dalam kategori sangat efektif dengan disertai biaya pemerolehan PAD yang sangat efisien (Putri & Munandar, 2021). Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal dan sistem manajemen pendidikan terhadap mutu sekolah dasar di Kota Malang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif (Mulisa, 2022) untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, sistem manajemen pendidikan, dan mutu sekolah dasar. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam mengukur dampak variabel independen (desentralisasi fiskal dan sistem manajemen pendidikan) terhadap variabel dependen (mutu sekolah) melalui analisis statistik. Penelitian kuantitatif memberikan pengukuran yang tepat dan memungkinkan pengujian hipotesis yang ketat, memfasilitasi pembentukan hubungan sebab akibat antarvariabel (Gundry & Deterding, 2019). Sebelumnya dilakukan pengujian terhadap instrumen yang prosesnya menyertakan pengujian *item-total correlation* dan realibilitas apha.

Sampel penelitian terdiri dari 22 sekolah dasar negeri yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling, yaitu pendekatan berbasis probabilitas dimana jumlah populasi sebanyak 195 SD Negeri yang dibagi ke dalam kecamatan-kecamatan yang homogen (Gundry & Deterding, 2019). Hal ini memastikan bahwa setiap sekolah dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih, sehingga meningkatkan keterwakilan sampel dan generalisasi temuan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan tanggapan dari 43 responden yang terdiri dari 34 guru (79,1%) dan 9 kepala sekolah (20,9%). Responden ini merupakan pemangku kepentingan utama dalam sistem pendidikan dan dapat memberikan wawasan berharga mengenai variabel penelitian (Jamieson, Govaart, & Pownall, 2023). Data dikumpulkan melalui survei yang dirancang untuk memperoleh informasi spesifik terkait desentralisasi fiskal, sistem manajemen pendidikan, dan indikator mutu sekolah.

Teknik analisis data meliputi metode pengujian hipotesis yang relevan untuk menguji

hubungan antara variabel independen dan dependen (Bergin, 2018). Analisis regresi digunakan untuk menilai dampak desentralisasi fiskal dan berbagai sistem manajemen terhadap metrik mutu sekolah, dengan mengendalikan potensi variabel perancu. Selain itu, statistik deskriptif digunakan untuk merangkum karakteristik populasi sampel dan variabel kunci yang diteliti (Vaclavik, Sikorova, & Barot, 2019). Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang kuat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bukti empiris terhadap pemahaman faktor-faktor yang memengaruhi mutu sekolah dasar dalam konteks desentralisasi fiskal dan sistem manajemen pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden penelitian berjumlah 43 orang yang terdiri dari guru 34 orang (79,1%) dan kepala sekolah 9 orang (20,9%). Jenis kelamin responden terdiri dari 8 orang laki-laki (18,6%) dan perempuan 35 orang (81,4%). Masa kerja paling sedikit 1 tahun, paling lama 37 tahun, dan rata-rata 12,46 tahun.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	.568 ^a	.323	.290	172.355

a. Predictors: (Constant), Sistem Manajemen, Desentralisasi Fiskal

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Ada pengaruh desentralisasi fiskal terhadap perbaikan mutu sekolah; (2) Ada pengaruh sistem manajemen pendidikan terhadap mutu sekolah; dan (3) Ada pengaruh desentralisasi fiskal dan sistem manajemen pendidikan terhadap mutu sekolah. Dalam analisis regresi, uji asumsi sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas model yang digunakan. Uji asumsi yang digunakan yaitu linearitas, homoskedastisitas, dan Kolmogorov-Smirnov. Ketiga uji tersebut menghasilkan

hubungan antara variabel independen dan dependen linear, varians residual (*error*) konstan di seluruh rentang nilai variabel independent, dan residual terdistribusi normal.

Nilai R sebesar 0,568 menunjukkan bahwa korelasi/hubungan antara mutu sekolah dengan 2 variabel independent-nya adalah kuat, karena angka di atas 0,5. *Adjuted R square*, yaitu 0,290, hal ini berarti 29,0% variasi dari mutu sekolah bisa dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independent. Sedangkan sisanya ($100\% - 29,0\% = 71,1\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. *Standard Error of Estimate (SEE)* adalah 172.3 point/perbaikan mutu sekolah (satuan yang dipakai adalah variabel dependent yaitu perbaikan mutu sekolah). Makin kecil *SEE* akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependent. Kontribusi kedua variabel bebas yang kecil memperlihatkan faktor lain yang

berperan memberikan pengaruh. Tabel 1 memperlihatkan model *summary* untuk semua variabel yang diteliti.

Dari uji ANOVA atau *F test*, didapat F hitung adalah 9.783 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi perbaikan mutu sekolah. Dengan demikian, desentralisasi fiskal dan sistem manajemen pendidikan berpengaruh secara bersama-sama terhadap mutu sekolah seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 3 memperlihatkan koefisien variabel penelitian. Hasil uji signifikansi konstanta dan setiap variabel independent menunjukkan bahwa variabel sistem manajemen mempunyai angka signifikan di bawah 0,05. Karena itu, variabel independent tersebut memang memengaruhi perbaikan mutu sekolah. Terdapat signifikansi positif pada sistem manajemen pendidikan

Tabel 1 Model Sumarry

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of The Estimate
1	.568 ^a	.323	.290	172.355

a. Predictors: (Constant), Sistem Manajemen, Desentralisasi Fiskal

Tabel 2 ANOVA

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	581.262	2	290.631	9.783	.000 ^b
Residual	121.795	41	297.063		
Total	179.922	43			

a. Dependent Variable: Mutu Sekolah

b. Predictors: (Constant), Sistem Manajemen, Desentralisasi Fiskal

Tabel 3 Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.826	5.085		1.146	.259
1. desentralisasi fiskal	.018	.034	.083	.514	.610
sistem manajemen	.319	.096	.532	3.310	.002

a. Dependent Variable: mutu sekolah

terhadap mutu sekolah dasar. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun otonomi fiskal dan praktik manajemen yang efektif merupakan faktor penting yang menentukan hasil pendidikan, gabungan dampak keduanya dapat bersifat sinergis dalam meningkatkan mutu sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh desentralisasi fiskal terhadap perbaikan mutu sekolah. Studi yang dilakukan oleh Caldwell (2018) dan Smidova (2019) mengungkap dampak desentralisasi fiskal terhadap hasil pendidikan di berbagai daerah. Temuan mereka menunjukkan adanya korelasi positif antara peningkatan otonomi fiskal di tingkat daerah dan peningkatan metrik mutu sekolah seperti kinerja siswa dan rasio guru-siswa. Hal ini menunjukkan bahwa memberdayakan pemerintah daerah dengan kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya keuangan dapat menghasilkan alokasi dana pendidikan yang lebih efektif sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah.

Selain itu, penelitian yang dilakukan Jin dan Rider (2020) dan Sarwar, Jadoon, Javed, & Nasim, (2022) meneliti mekanisme desentralisasi fiskal dan pengaruhnya mutu pendidikan. Melalui analisis komprehensif terhadap data administratif dan perubahan kebijakan, mereka mengidentifikasi bahwa sistem fiskal yang terdesentralisasi cenderung mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam belanja pendidikan. Dengan mendesentralisasikan proses pengambilan keputusan, pemerintah daerah menjadi lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakatnya, mengarahkan sumber daya ke arah inisiatif yang berdampak langsung pada mutu sekolah, seperti perbaikan infrastruktur, program pelatihan guru, dan integrasi teknologi pendidikan. Penelitian tersebut relevan dengan pendidikan dasar di Indonesia karena pengelolaannya terletak di kabupaten/kota.

Tidak semua penelitian sejalan dengan manfaat desentralisasi fiskal terhadap mutu sekolah. Smoke (2015) dan Wright Andersson,

Gibson, dan Evans, (2016) dalam penelitiannya menemukan hasil yang beragam mengenai efektivitas kebijakan desentralisasi. Meskipun beberapa daerah mengalami peningkatan yang signifikan dalam hasil pendidikan setelah desentralisasi, daerah lain hanya mengalami sedikit atau tidak ada dampak sama sekali. Penelitian Pertiwi (2023) di Kota Batu mengungkap bahwa pemerintah daerah masih belum bisa melepas ketergantungan fiskal dari pemerintah pusat, tidak berbeda jauh dengan kondisi di Kabupaten Bulukumba (Zarkasyi & Digdowiseiso, 2023). Desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat (Dona, Gautama, & Muslim, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan inisiatif desentralisasi fiskal mungkin bergantung pada berbagai faktor kontekstual seperti struktur pemerintahan, kapasitas administratif, dan kondisi sosial ekonomi, yang menyoroti kompleksitas hubungan antara otonomi fiskal dan mutu pendidikan.

Meskipun pengaruh desentralisasi fiskal terhadap peningkatan mutu sekolah masih menjadi topik penelitian, penelitian terbaru memberikan pengetahuan berharga mengenai potensi manfaat dan tantangan yang terkait dengan kebijakan tersebut (Faguet, 2014; Martinez-Vazquez *et al.*, 2017). Dengan memberdayakan pemerintah daerah dengan kendali yang lebih besar atas sumber daya keuangan, desentralisasi fiskal dapat mendorong akuntabilitas, transparansi, dan daya tanggap dalam belanja pendidikan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan mutu sekolah (Dick-Sagoe, 2020; Shah, 1998). Namun, efektivitas inisiatif desentralisasi mungkin berbeda-beda di berbagai konteks, sehingga menekankan perlunya penelitian lebih lanjut dan pendekatan kebijakan yang disesuaikan untuk memastikan peningkatan hasil pendidikan yang adil dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh sistem manajemen pendidikan terhadap mutu sekolah. Penelitian Badenhorst & Radile (2018) dan Lunenburg (2017) menekankan pentingnya praktik manajemen sekolah yang efektif dalam menumbuhkan lingkungan belajar yang kondusif. Studi mereka mengungkapkan bahwa sekolah dengan kepemimpinan yang kuat, saluran komunikasi yang jelas, dan struktur administrasi yang kuat cenderung menunjukkan tingkat prestasi akademik, keterlibatan siswa, dan mutu sekolah secara keseluruhan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan pentingnya berinvestasi dalam sistem manajemen komprehensif yang memprioritaskan perencanaan strategis, alokasi sumber daya, dan pengembangan staf untuk mengoptimalkan hasil pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wang Zheng, dan Zhao, (2012) menekankan dampak model manajemen desentralisasi terhadap mutu sekolah. Dengan membandingkan berbagai pendekatan manajemen dalam berbagai konteks pendidikan, temuan mereka menunjukkan bahwa sistem desentralisasi, yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya, sering kali memberikan hasil positif terhadap mutu sekolah. Sistem seperti ini memberdayakan administrator sekolah dan guru untuk menyesuaikan strategi pendidikan sesuai dengan kebutuhan spesifik siswa dan komunitasnya, sehingga menghasilkan praktik pedagogi yang lebih inovatif, pengalaman belajar yang dipersonalisasi, dan pada akhirnya, meningkatkan kinerja akademik.

Masih terdapat tantangan dalam penerapan sistem manajemen pendidikan yang efektif, seperti yang disoroti dalam penelitian Patel, Chisholm, Dua, Laxminarayan, Medina-Mora, & Vos (2016). Studi mereka mengidentifikasi hambatan sistemik seperti inefisiensi birokrasi, pelatihan pemimpin sekolah yang tidak memadai, dan mekanisme dukungan yang tidak memadai, yang menghambat keberhasilan implementasi

reformasi manajemen dan melemahkan upaya peningkatan mutu sekolah. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya bersama untuk meningkatkan inisiatif peningkatan kapasitas, menyederhanakan proses administrasi, dan membina kemitraan kolaboratif antara pembuat kebijakan, pemangku kepentingan pendidikan, dan masyarakat lokal untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengelolaan pendidikan yang efektif.

Hasil penelitian menunjukkan peran penting sistem manajemen pendidikan dalam membentuk mutu sekolah dan hasil pendidikan. Praktik manajemen yang efektif, yang ditandai dengan kepemimpinan yang kuat, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, dan alokasi sumber daya yang strategis, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran dan keberhasilan akademik. Namun, mewujudkan potensi penuh sistem manajemen pendidikan memerlukan penanganan tantangan sistemik dan investasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan untuk memastikan akses yang adil terhadap pendidikan bermutu bagi semua siswa.

Hasil penelitian juga menunjukkan ada pengaruh desentralisasi fiskal dan sistem manajemen pendidikan terhadap mutu sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Agyemang-Duah, Agyemang-Duah, Kafui Gbedoho, Peprah, Arthur, Kweku Sobeng, *et al* (2018) dan Crook & Manor (2002) mengenai dampak gabungan otonomi fiskal dan praktik manajemen terhadap mutu sekolah di berbagai wilayah menunjukkan bahwa jika disertai dengan sistem manajemen yang efektif, desentralisasi fiskal dapat menghasilkan peningkatan hasil pendidikan yang signifikan. Sekolah yang memiliki otonomi keuangan yang lebih besar dan struktur manajemen yang diberdayakan cenderung menunjukkan tingkat prestasi akademik, kepuasan siswa, dan kinerja sekolah secara keseluruhan yang lebih tinggi (Caliba, 2022; Luschei, 2012; Prifti, 2022). Hal ini menunjukkan

adanya hubungan sinergis antara desentralisasi fiskal dan manajemen pendidikan yang efektif.

Selain itu, penelitian oleh Mesfin & Teka (2023) dan Miranda-Lescano, Muinelo-Gallo, & Roca-Sagalés (2024) telah menyoroti berbagai cara desentralisasi fiskal berinteraksi dengan sistem manajemen pendidikan untuk memengaruhi mutu sekolah. Dengan menganalisis data dari beragam konteks pendidikan, penelitian mereka mengungkapkan bahwa efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal bergantung pada mutu praktik pengelolaan yang diterapkan di tingkat daerah. Sistem yang terdesentralisasi dengan kepemimpinan yang kuat, proses pengambilan keputusan yang transparan, dan mekanisme tata kelola yang partisipatif akan lebih mampu memanfaatkan otonomi fiskal secara efektif, mengarahkan sumber daya ke inisiatif yang berdampak langsung pada mutu sekolah, seperti program pelatihan guru, perbaikan infrastruktur, dan pengembangan kurikulum.

Masih terdapat tantangan dalam mewujudkan potensi penuh desentralisasi fiskal dan reformasi manajemen pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah. Penelitian yang dilakukan Li (2022) dan Madubun (2023) mengidentifikasi hambatan sistemik seperti kelamahan birokrasi, upaya peningkatan kapasitas yang tidak memadai, dan distribusi sumber daya yang tidak adil yang menghambat keberhasilan penerapan kebijakan desentralisasi dan melemahkan efektivitas reformasi manajemen. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan desentralisasi fiskal dengan strategi pengelolaan yang komprehensif, mendorong kolaborasi antara pembuat kebijakan, pendidik, dan pemangku kepentingan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan mutu sekolah yang berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan keterkaitan antara desentralisasi fiskal, sistem manajemen

pendidikan, dan mutu sekolah. Meskipun kebijakan fiskal yang terdesentralisasi mempunyai potensi untuk memberdayakan pemangku kepentingan lokal dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, efektivitasnya bergantung pada mutu praktik pengelolaan dan keberadaan struktur tata kelola yang mendukung. Dengan mengatasi hambatan sistemik dan mendorong proses pengambilan keputusan yang kolaboratif, para pembuat kebijakan dapat memanfaatkan efek sinergis dari desentralisasi fiskal dan manajemen pendidikan yang efektif untuk mendorong akses yang adil terhadap pendidikan bermutu.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Beragam faktor memengaruhi mutu sekolah, khususnya peran desentralisasi fiskal dan sistem manajemen pendidikan. Penelitian ini menemukan pengaruh signifikan desentralisasi fiskal dan sistem manajemen pendidikan terhadap mutu sekolah dasar. Penelitian ini menunjukkan bahwa otonomi fiskal dan praktik manajemen yang efektif merupakan faktor penting yang menentukan hasil pendidikan dan gabungan dampak keduanya dapat bersifat sinergis dalam meningkatkan mutu sekolah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari diskusi mengenai desentralisasi fiskal, sistem manajemen pendidikan, dan dampaknya terhadap mutu sekolah, terdapat beberapa saran untuk para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan pendidikan. Pertama, terdapat kebutuhan untuk memprioritaskan penerapan kebijakan fiskal yang terdesentralisasi bersamaan dengan reformasi manajemen komprehensif yang mendorong akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi pemangku kepentingan di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan pemimpin sekolah dengan otonomi yang lebih besar dalam

pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, didukung oleh inisiatif peningkatan kapasitas untuk meningkatkan efektivitas administrasi, dan keterampilan kepemimpinan.

Kedua, membina kemitraan kolaboratif di antara para pembuat kebijakan, pendidik, dan pemangku kepentingan masyarakat. Upaya ini sangat penting untuk mengatasi hambatan sistemik dan memastikan distribusi sumber daya yang adil sehingga mendorong peningkatan mutu sekolah yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketiga, berinvestasi pada intervensi kebijakan berbasis penelitian dan mekanisme pemantauan dan evaluasi berkelanjutan dapat memfasilitasi pengambilan keputusan dan praktik

pengelolaan adaptif. Investasi ini bertujuan memenuhi kebutuhan dan tantangan pendidikan yang terus berkembang.

Dengan mengadopsi rekomendasi-rekomendasi tersebut, para bupati atau wali kota melalui struktur dan infrastruktur dinas pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan kondusif untuk mendorong pemerataan akses terhadap pendidikan bermutu dan meningkatkan hasil pendidikan bagi semua siswa. Perwujudan rekomendasi dapat dilakukan melalui struktur manajemen yang kuat, kepemimpinan yang handal, pengambilan keputusan yang transparan, dan mekanisme tata kelola yang partisipatif.

PUSTAKA ACUAN

- Agyemang-Duah, W., Kafui Gbedoho, E., Peprah, P., Arthur, F., Kweku Sobeng, A., Okyere, J., & Mengba Dokbila, J. (2018). Reducing poverty through fiscal decentralization in Ghana and beyond: A review. *Cogent Economics & Finance*, 6(1) doi.org/10.1080/23322039.2018.1476035
- Anthony, B. (2023). Deployment of distributed ledger and decentralized technology for transition to smart industries. *Environment Systems and Decisions*, 43(2), 298–319. doi.org/10.1007/s10669-023-09902-5
- Badenhorst, J.W., & Radile, R.S. (2018). Poor performance at TVET colleges: Conceptualising a distributed instructional leadership approach as a solution. *Africa Education Review*, 15(3), 91–112. doi.org/10.1080/18146627.2017.1352452
- Bergin, T. (2018). *An Introduction to Data Analysis: Quantitative, Qualitative and Mixed Methods*. 1–296. SAGE Publications Ltd
- Bush, T. (2020). *Theories of educational leadership and management*. SAGE Publications Ltd.
- Caldwell, B.J. (2018). *The alignment premium: Benchmarking Australia's student achievement, professional autonomy and system adaptivity*. ACER Press.
- Caliba, I. (2022). Self-efficacy, working conditions, school-based management practices and performance of teachers. *Psychology and Education: A Multidisciplinary Journal*, 1(2), 107–125. doi.org/10.5281/zenodo.6523194
- Crook, R., & Manor, J. (2002). Democratic decentralization. In *Making development work*. Routledge.
- Dick-Sagee, C. (2020). Decentralization for improving the provision of public services in developing countries: A critical review. *Cogent Economics & Finance*, 8(1), 1-13. doi.org/10.1080/23322039.2020.1804036
- Dona, E., Gautama, G., & Muslim, I. (2022). Berpengaruhkah desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan? *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4153-4164. doi.org/10.47492/jip.v2i12.1519
- Efriandi, T., Couwenberg, O., & Holzhacker, R.L. (2019). Decentralization and public service provision:

- A case study of the education sector in Jayawijaya District, Papua, Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 41(3), 364–389. doi.org/10.1355/cs41-3b
- Ergenc, C., & Yuksekkaya, O. (2024). Institutionalizing authoritarian urbanism and the centralization of urban decision-making. *Territory, Politics, Governance*, 12(3), 410–429. doi.org/10.1080/21622671.2021.2020156
- Faguet, J.P. (2014). Decentralization and governance. *World Development*, 53, 2–13. doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002
- George, A.S., Sagayarajan, S., AlMatroudi, Y., & George, A.S.H. (2023). IF/THEN Democracy: Exploring the World of Decentralized Autonomous Organizations (DAOs). *Partners Universal International Research Journal*, 2(2), Article 2. doi.org/10.5281/zenodo.8051072
- Gilrein, E.J., Carvalhaes, T.M., Markolf, S.A., Chester, M.V., Allenby, B.R., & Garcia, M. (2021). Concepts and practices for transforming infrastructure from rigid to adaptable. *Sustainable and Resilient Infrastructure*, 6(3–4), 213–234. doi.org/10.1080/23789689.2019.1599608
- Glover, D., & Levaèiæ, R. (2020). *Educational resource management: An international perspective*. UCL Press. doi.org/10.14324/111.9781787358386
- Groenewald, C.A., Groenewald, E., Uy, F., Kilag, O. K., Abendan, C.F., & Dulog, S.M. (2024). The future: Trends and implications for organizational management. *International Multidisciplinary Journal of Research for Innovation, Sustainability, and Excellence (IMJRISE)*, 1(3), 114–120. <https://risejournals.org/index.php/imjrise/article/view/191>
- Gundry, D., & Deterding, S. (2019). Validity threats in quantitative data collection with games: A narrative survey. *Simulation & Gaming*, 50(3), 302–328. doi.org/10.1177/1046878118805515
- Hanif, I., Wallace, S., & Gago-de-Santos, P. (2020). Economic growth by means of fiscal decentralization: An empirical study for federal developing countries. *Sage Open*, 10(4), 1–12 doi.org/10.1177/2158244020968088
- Jamieson, M.K., Govaart, G.H., & Pownall, M. (2023). Reflexivity in quantitative research: A rationale and beginner's guide. *Social and Personality Psychology Compass*, 17(4), e12735. doi.org/10.1111/spc3.12735
- Jennifer, A., Isravel, D.P., Sagayam, K.M., Bhushan, B., Sei, Y., & Eunice, J. (2023). Blockchain for healthcare systems: Architecture, security challenges, trends and future directions. *Journal of Network and Computer Applications*, 215, 103633. doi.org/10.1016/j.jnca.2023.103633
- Jin, Y., & Rider, M. (2020). Does fiscal decentralization promote economic growth? An empirical approach to the study of China and India. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(6), 146–167. doi.org/10.1108/JPBAFM-11-2019-0174
- Krawchenko, T. (2021). *Public sector and productivity: Governing at the right scale* Background paper for the OECD-EC High-Level Expert Workshop Series “Productivity Policy for Places”, April 18–19.
- Lee, J. (2024). Repowerment beyond empowerment: Collaborative accountability of citizens, corporations and civil servants. *International Journal of Public Sector Management, ahead-of-print*(ahead-of-print). doi.org/10.1108/IJPSM-11-2023-0340
- Li, A. (2022). Centralization or decentralization: Divergent paths of governing offshore wind between China and Japan. *Energy Research & Social Science*, 84, 102426. doi.org/10.1016/j.erss.2021.102426

- Lubuulwa, K.B. (2021). Putting decentralisation policy into practice in Uganda: A participatory action research study of local government empowerment for local economic development. *Thesis*, University of Tasmania. doi.org/10.25959/23249999.v1
- Lunenburg, F. C. (2017). Organizational structure and design. *Journal of Educational Leadership and Policy Studies*, 1(1), 21–43.
- Luschei, T.F. (2012). The effectiveness and distribution of male primary teachers: Evidence from two Mexican states. *International Journal of Educational Development*, 32(1), 145–154. doi.org/10.1016/j.ijedudev.2010.12.001
- Madubun, J. (2023). Public services in island sub-districts: Towards geography-based governance. *Australian Journal of Public Administration*, n/a(n/a), 1–21. doi.org/10.1111/1467-8500.12586
- Martinez-Vazquez, J., Lago-Peñas, S., & Sacchi, A. (2017). The impact of fiscal decentralization: A survey. *Journal of Economic Surveys*, 31(4), 1095–1129. doi.org/10.1111/joes.12182
- Mesfin, S., & Teka, T. (2023). The practice of fiscal decentralization at local level in Ethiopia: Evidence from Oromia and Afar Regional States. *Cogent Social Sciences*, 9(2). doi.org/10.1080/23311886.2023.2241260
- Miranda-Lescano, R., Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2024). Redistributive efficiency of fiscal policy: The role of decentralization and good governance. *Regional & Federal Studies*, 34(2), 189–216. doi.org/10.1080/13597566.2022.2092844
- Mulisa, F. (2022). When does a researcher choose a quantitative, qualitative, or mixed research approach? *Interchange*, 53(1), 113–131. doi.org/10.1007/s10780-021-09447-z
- Muttaqin, T., van Duijn, M., Heyse, L., & Wittek, R. (2016). The impact of decentralization on educational attainment in Indonesia. R.L. Holzhaecker, R. Wittek, & J. Woltjer (Eds.), *Decentralization and Governance in Indonesia 2*, 79–103). Springer International Publishing. doi.org/10.1007/978-3-319-22434-3_4
- Nasrullah, Ul Amin, R., & Soomro, K.A. (2021, March 1). *Decentralization of education: The affective role of fiscal decentralization in Pakistani Education System(s)*. FWU Journal of Social Sciences, 15, (1), 41-51. doi.org/10.51709/19951272/spring2021/15-4
- Nurlaili, M.Y.S.E. (2022). Analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 6(2), 178–187. doi.org/10.22219/jie.v6i2.20457
- Nyikadzino, T., & Vyas-Doorgapersad, S. (2022). Zimbabwe’s transition to a devolved system of government: Critical factors for success. *Africa’s Public Service Delivery and Performance Review*, 10(1), 604. doi.org/10.4102/apsdpr.v10i1.604
- Omapas, M.L., Parinasan, M.A., Ben, L., Peñero, R., & Quiñanola, K.J. (2024). The impact and challenges of school-based decision-making on educational outcomes. *International Multidisciplinary Journal of Research for Innovation, Sustainability, and Excellence (IMJRISE)*, 1(3), 39-44. https://risejournals.org/index.php/imjrise/article/view/173
- Patel, V., Chisholm, D., Dua, T., Laxminarayan, R., Medina-Mora, M.L., & Vos, T. (2016). *Disease Control Priorities, Third Edition (Volume 4): Mental, Neurological, and Substance Use Disorders*. World Bank Publications.
- Pertiwi, V. (2023). Desentralisasi fiskal dan pola ketergantungan daerah Kota Batu Jawa Timur, *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 47–58. doi.org/10.30996/jpap.v9i1.8268

- Prifti, R. (2022). Self-efficacy and student satisfaction in the context of blended learning courses. *Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning*, 37(2), 111–125. doi.org/10.1080/02680513.2020.1755642
- Purwanto, E.A., & Pramusinto, A. (2018). Decentralization and functional assignment in Indonesia: The case of health and education services. *Policy Studies*, 39(6), 589–606. doi.org/10.1080/01442872.2018.1530413
- Putri, R.S.E., & Munandar, A. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Malang tahun anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(3), 2296-2313. doi.org/10.31955/mea.v5i3.1684
- Rosser, A.J., & Fahmi, M. (2016). *The political economy of teacher management in decentralized Indonesia* (SSRN Scholarly Paper 2885077). <https://papers.ssrn.com/abstract=2885077>
- Sarwar, A., Jadoon, A.K., Javed, M.F., & Nasim, I. (2022). Assessing the effects of fiscal decentralization on the efficiency of education sector: Analysis of Punjab, Pakistan. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 10(2). doi.org/10.52131/pjhss.2022.1002.0215
- Shah, A. (1998). Fostering fiscally responsive and accountable governance: Lessons from decentralization. In *Evaluation and Development*. Routledge.
- Shahid, M., Ahmad, K., Naushahi, M.M., & Inayat, M.A. (2024). Tax decentralization and economic growth of Pakistan: The role of political institutions. *Bulletin of Business and Economics (BBE)*, 13(1), 78-88, doi.org/10.61506/01.00195
- Shaked, H. (2019). Ensuring teachers' job suitability: A missing component of instructional leadership. *Journal of School Leadership*, 29(5), 427–447. doi.org/10.1177/1052684619858837
- Smidova, Z. (2019). *Educational outcomes: A literature review of policy drivers from a macroeconomic perspective*. OECD. doi.org/10.1787/990801aa-en
- Smith, B.C. (2023). *Decentralization: The territorial dimension of the state*. Taylor & Francis.
- Smoke, P. (2015). Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform. *Public Administration and Development*, 35(2), 97–112. doi.org/10.1002/pad.1703
- Vaclavik, M., Sikorova, Z., & Barot, T. (2019). Particular analysis of normality of data in applied quantitative research. In R. Silhavy, P. Silhavy, & Z. Prokopova (Eds.), *Computational and Statistical Methods in Intelligent Systems* (pp. 353–365). Springer International Publishing. doi.org/10.1007/978-3-030-00211-4_31
- Wang, W., Zheng, X., & Zhao, Z. (2012). Fiscal reform and public education spending: A quasi-natural experiment of fiscal decentralization in China. *Publius: The Journal of Federalism*, 42(2), 334–356. doi.org/10.1093/publius/pjr039
- Wright, G.D., Andersson, K.P., Gibson, C.C., & Evans, T.P. (2016). Decentralization can help reduce deforestation when user groups engage with local government. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(52), 14958–14963. doi.org/10.1073/pnas.1610650114
- Zargham, M., & Nabben, K. (2022). *Aligning 'Decentralized Autonomous Organization' to precedents in cybernetics* (SSRN Scholarly Paper 4077358). doi.org/10.2139/ssrn.4077358
- Zarkasyi, S., & Digidowiseiso, K. (2023). Analisis desentralisasi fiskal Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(4), 4428-4434 doi.org/10.37385/msej.v4i5.2611